ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI PROVINSI DKI JAKARTA

Tahun 2000-2016

JURNAL

Dosen Pembimbing : Suharto ,S.E., M.Si.

Disusun Oleh :

Nama : **Muhamad Syahru Romadhon**

NIM : **13313210**

Jurusan : **Ilmu Ekonomi**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2017

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2000-2016

Muhamad Syahru Romadhon

romadhoen95@gmail.com

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah Provinsi DKI jakarta selama 17 tahun pengamatan, yaitu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2016. Adapun data independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah tenaga kerja asing, jumlah penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor balik nama dan inflasi. Model regresi yang digunakan adalah regresi linier berganda (*Multiple Linier Regression Method*) dengan metode kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square* (OLS).

Hasil analisis uji F menunjukkan secara keseluruhan variabel independen (PDRB, jumlah tenaga kerja asing, jumlah penerbitan STNK balik nama dan inflasi) secara bersama-sama terdapat pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil analisis uji t PDRB berpengaruh signifikan positif, jumlah tenaga kerja asing berpengaruh signifikan negatif, dan inflasi berpengaruh signifikan positif, sedangkan jumlah penerbitan STNK balik nama tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah pada alfa 10%.

Kata kunci : Pajak Daerah, PDRB, Jumlah Tenaga Kerja Asing, Jumla Penerbitan STNK Balik Nama, Inflasi.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Diterbitkannya sebuah kebijakan desentralisasi ialah sebagai upaya efisiensi dan mempermudah tugas-tugas pemerintah pusat ke daerah-daerah, yang dituangkan melalui otonomi daerah. Dimana setiap daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki hak beserta wewenang untuk mengatur pemerintahan dan mengelola keuangan rumah tangganya sendiri guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana kebijakan otonomi daerah yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

DKI Jakarta merupakan sebuah ibu kota Provinsi Negara Indonesia yang tentunya sangat ramai dengan aktivitas ekonomi para pebisnis dan investor dari berbagai sektor usaha dan masyarakat kelas elit menengah ke atas (berpendapatan tinggi) yang diantaranya mempunyai kebiasaan mengonsumsi terhadap barang-barang mewah. Dengan mengoptimaklan Para subjek wajib pajak di atas tentu akan meningkatkan skala penerimaan pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berperan dalam mendorong peningkatan pelayanan masyarakat dan perkembangan pembangunan Provinsi DKI Jakarta.

Menurut BPS DKI Jakarta (2017) Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2016 diperoleh sebesar Rp 36.883.621.580, dimana 85% dari nilai tersebut berasal dari penerimaan pajak daerah dan 15% sisanya dari berbagai sektor lainnya. Ini menunjukkan bahwa pendapatan PAD terbesar ialah pajak daerah. Tentu penerimaan ini diperoleh tak terlepas dari keterkaitan pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat sehingga pertumbuhan penduduk dan peningkatan ekonomi ikut mendorong penerimaan pajak daerah.

Adapun sumber pajak daerah dapat diperoleh di antaranya yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan. Dari jenis-jenis pajak tersebut yang harus ditaati oleh pihak wajib pajak sesuai dengan ketentuan perda Provinsi DKI Jakarta No.6 Tahun 2010 dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Besar kecilnya penerimaan pajak daerah tak dapat dipungkiri, bahwa terdapat faktor-faktor yang bisa mempegaruhi, diantaranya yaitu PDRB, jumlah tenaga kerja asing, jumlah balik nama stnk kendaraan bermotor, tingkat inflasi dan kebijakan pemerintah di atasnya (pemerintah pusat). faktor-faktor tersebut acap kali mengalami fluktuasi dalam setiap tahun, tentunya dapat digunakan sebagai instrumen untuk menentukan penerimaan pajak daerah pada periode tertentu atau tahun selanjutnya. Oleh karena itu hal ini perlu dirumuskan solusi atau kebijakan yang matang oleh pemerintah daerah guna mengatasi kendala-kendala yang dapat menghambat penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penerimaan pajak daerah yang telah dijabarkan, maka peneliti tertarik untuk menganalisa variabel-variabel independen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah tenaga kerja asing, jumlah STNK balik nama yang diterbitkan dan tingkat inflasi serta seberapa besar pengaruhnya terhadap penerimaan pajak daerah yang sebagai variabel dependen pada Provinsi DKI Jakarta.

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Kajian Pustaka

Arianto (2014), dalam penelitiannya menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk, Inflasi, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil yang diperoleh dari analisis penelitiannya, bahwa jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh secara signifikan, sedangkan inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Surabaya. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan model regresi linier berganda (*Multiple Linear Regression Method*) dengan metode kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square* (OLS) dari tahun 2003 - 2012.

Haniz (2013), dalam penelitiannya menganalisis pengaruh wajib pajak, pendapatan perkapita, inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Tegal. Hasil yang diperoleh dari analisis penelitiannya, bahwa wajib pajak, pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh

signifikan, sedangkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap perimaan pajak daerah Kota Tegal. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan model regresi linier berganda (*Multiple Linear Regression Method*) dengan metode kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square* (OLS) dari tahun 1991 - 2010.

Kajian Teori

Otonomi Daerah

Otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan dikeluarkannya peraturan Perundang-Undangan No. 22 Tahun 1998 tentang pemerintah daerah mengenai pelaksanaan desentralisasi.

Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang dianggap memberikan nilai kekayaan bersih yang sah dalam periode anggaran tertentu (Undang-Undang No.32 Tahun 2004). Pendapatan daerah berasal dari penerimaan dana perimbangan yang diberi oleh pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah itu sendiri beserta penerimaan lain-lain yang sah. Sumber pendapatan asli daerah yaitu penerimaan keuangan yang diperoleh dari penggalian potensi-potensi yang berada di daerah itu sendiri, diantaranya dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain.

Aspek-Aspek Perpajakan

Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan iuran yang merupakan hak preogatif pemerintah, iuran tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan pada wajib pajak dengan tidak ada balas jasa langsung dan dapat ditunjukkan penggunaannya (Magkoesoebroto, 1998).

Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dibagi dua jenis pajak daerah yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, pembagian tersebut sebagai berikut:

1) Pajak provinsi: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.
2) Pajak kabupaten/kota: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut BPS (2017), PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antar masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor dalam jangka waktu tertentu.

Semakin besar PDRB berarti pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin tinggi. Pertumbuhan ekonomi bersangkut paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan PDRB. Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut (Thamrin, 2001). Bila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat pula. Dengan naiknya pendapatan masyarakat, maka tingkat konsumsi masyarakat akan meningkat pula, dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Jumlah Tenaga Kerja Asing

Tenaga kerja asing ialah seseorang bukan warga Negara Indonesia yang bekerja menghasilkan barang dan jasa di dalam atau di luar hubungan kerja demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pajak penghasilan bagi tenaga kerja asing dapat berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri tergantung masa bertempat

tinggal di Indonesia. Berdasarkan undang-undang pajak penghasilan pasal 2 ayat 3 nomor 36 tahun 2008, yang dimaksud subjek pajak dalam negeri apabila orang pribadi bertempat tinggal di Indonesia lebih dari satu tahun atau berada di satu tahun pajak, sedangkan subjek pajak luar negeri berdasarkan undang-undang pajak penghasilan pasal 2 ayat 4 nomor 36 tahun 2008 ialah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari satu tahun, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Jumlah penerbitan STNK Balik Nama

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berbentuk surat yang diterbitakan oleh Polisi Republik Indonesia yang berisi identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor dan masa berlaku termasuk pengesahannya. Setiap kendaraan bermotor wajib memiliki STNK sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan yang sah. Apabila identitas kepemilikan untuk diganti kepada pihak kedua dan seterusnya maka harus diurus melalui SAMSAT dan pemindahan identitas kepemilikan tersebut dikenakan pajak bea balik nama kendaraan sesuai peraturan daerah nomor 9 tahun 2010.

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Pengenaan pajak tersebut didasarkan pada nilai jual kendaraan dan tahun keluaran kendaraan. Adapun besaran tarif pajak yang dikenakan sebesar 10% dari penyerahan pertama, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% dari nilai jual kendaraan tersebut. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, penerapan tarif pajak ditetapkan sebesar 0,75% penyerahan pertama, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% dari nilai jual kendaraan.

Inflasi

Peristiwa inflasi ini dapat memberikan dampak yang baik maupun buruk tergantung tinggi rendahnya persentase tingkat inflasi. Jika inflasi hanya pada persentase tingkat ringan, inflasi akan memberikan hal positif terhadap kondisi ekonomi, diantaranya meningkatkan pedapatan nasional atau pendapatan daerah, mendorong orang untuk gairah bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Namum apabila inflasi pada persentase yang parah, maka akan mengakibatkan kekacauan ekonomi, aktivitas menabung dan investasi menurun, harga barang-barang menjadi tinggi, masyarakat menjadi kesulitan untuk mengimbangi biaya konsumsi dan aktivitas ekonominya.

Inflasi dibagi menjadi empat jenis, yaitu inflasi ringan, sedang, berat dan hiperinflasi. Inflasi ringan apabila kenaikan harga di bawah 10% setahun, inflasi sedang di antara 10% hingga 30% setahun, inflasi berat antara 30% hingga 100% sehatun, dan hiperinflasi apabila tingkat inflasi di atas 100% setahun.

Hipotesis Penelitian

Diduga variabel PDRB, jumlah tenaga kerja asing, jumlah penerbitan STNK balik nama, dan inflasi berpengaruh secara signifikan positif terhadap penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta tahun 2000-2016.

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari suatu variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*) maka penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda (*Multiple Linier Regression Method*) dengan metode kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square* (OLS). Metode ini diyakini mempunyai sifat-sifat yang ideal dan dapat diunggulkan, yaitu secara teknis sangat kuat, mudah dalam perhitungan dan penarikan interpretasinya (Gujarati, 1995).

Adapun persamaan regresi linier berganda dinyatakan sebagai berikut :

$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4)$

$Y = \alpha+\beta_1X_1+ \beta_2X_2+ \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$

Dimana:

Y : Pajak Daerah

X_1 : PDRB

X_2 : Jumlah Tenaga Kerja Asing

X_3 : Jumlah Penerbitan STNK Balik Nama

X_4 : Inflasi

E : Error

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan secara statistik bahwa seluruh variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen, dengan hipotesis untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel tak bebas.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi-variabel dependen. Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

1) H0 : $\beta1/ \beta2/ \beta3/ \beta4 \leq \alpha$, yaitu terdapat pengaruh signifikan variabel independen secara individu terhadap variabel pajak daerah.
2) Ha : $\beta1/ \beta2/ \beta3/ \beta4 > \alpha$, yaitu tidak terdapat pengaruh signifikan variabel independen secara individu terhadap variabel pajak daerah.

Uji Koefisien Determinan (R^2)

R^2 bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel independen dapat menerangkan dengan baik variasi variabel dependen. Koefisien determinasi (R^2) merupakan angka yang memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel tak bebas (Y) yang di jelaskan oleh variabel bebas (X). Nilai R^2 yang sempurna adalah satu, yaitu apabila keseluruhan variasi dependen dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel independen yang dimasukkan dalam model.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* yang merupakan data tahunan secara berkala yang di peroleh dari DKI Jakarta. Data-data yang akan dianalisis yaitu Pajak Daerah, PDRB, Jumlah Tenaga Kerja Asing, Jumlah Penerbitan STNK Balik Nama dan Tingkat Inflasi tahun 2000 – 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen (penjelas) berpengaruh terhadap variabel dependen (terikat). Adapun datanya yaitu pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Data penerimaan pajak daerah, PDRB, Jumlah Tenaga Kerja Asing, Jumlah Penerbitan STNK Balik Nama dan Tingkat Inflasi Tahun 2000 – 2016

TAHUN	Y	X1	X2	X3	X4
2000	2.118.274.500	625.822.968	2.742	152.868	10,29
2001	3.056.748.100	648.613.001	2.845	157.960	11,62
2002	3.703.572.700	680.343.045	3.368	185.389	9,08
2003	4.401.724.700	716.470.621	3.583	145.384	5,78
2004	5.498.478.300	756.967.002	4.219	112.539	5,87
2005	6.499.708.700	802.478.059	4.289	354.687	16,06
2006	6.482.649.200	850.191.726	634	276.646	6,03
2007	7.202.527.400	904.940.001	5.283	278.209	6,04
2008	8.751.273.800	961.259.855	5.173	276.713	11,11
2009	8.560.134.900	1.009.376.676	5.523	298.436	2,34
2010	10.751.745.200	1.075.211.638	5.321	334.278	5,95
2011	15.221.249.800	1.147.558.230	4.728	355.310	3,97
2012	17.721.493.200	1.222.572.920	5.475	444.654	4,52
2013	23.367.019.940	1.296.694.573	4.529	476.505	8,00
2014	27.050.949.020	1.373.389.129	5.475	479.876	8,95
2015	29.076.926.600	1.454.345.823	2.525	665.050	3,30
2016	31.607.479.860	1.539.376.654	2.675	430.977	2,37

Sumber :DKI Jakarta 2000 - 2017, BPS (data diolah)

Keterangan :

Y : Pajak Daerah (ribu rupiah)

X_1 : PDRB (juta rupiah)

X_2 : Jumlah Tenaga Kerja Asing (jiwa)

X_3 : Jumlah Penerbitan STNK Balik Nama (lembar)

X_4 : Inflasi (persen)

Hasil Dan Analisis Data

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 2.2
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/07/17 Time: 21:44
Sample: 2000 2016
Included observations: 17

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.87E+10	3.00E+09	-6.238616	0.0000
X1	36.71168	3.663361	10.02131	0.0000
X2	-1501127.	351744.8	-4.267659	0.0011
X3	-4044.784	6496.758	-0.622585	0.5452
X4	2.76E+10	1.34E+10	2.056276	0.0622

R-squared	0.981689	Mean dependent var	1.24E+10
Adjusted R-squared	0.975585	S.D. dependent var	9.77E+09
S.E. of regression	1.53E+09	Akaike info criterion	45.36965
Sum squared resid	2.79E+19	Schwarz criterion	45.61471
Log likelihood	-380.6420	Hannan-Quinn criter.	45.39401
F-statistic	160.8363	Durbin-Watson stat	1.275135
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : data diolah Eviews8

Hasil Uji F

Uji F ini digunakan untuk menguji variabel independent secara keseluruhan dan bersama-sama, apakah variabel independent mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan

nilai Probabilitas (F-statistik) dengan tingkat signifikansi 10%, terlihat bahwa probabilitas (F-statistik) lebih kecil dari tingkat signifikansi 10% yaitu 0,000000 ≤ 0,1 dengan demikian variabel independen (PDRB, jumlah tenaga kerja asing, jumlah penerbitan STNK balik nama, dan tingkat inflasi) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pajak daerah.

Hasil Uji t

1) Uji t-statistik koefisien variabel X_1 (PDRB)

   $H_0 : \beta_1 \leq \alpha$

   $Ha : \beta_1 > \alpha$

   Variabel X_1 (PDRB) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari alfa 10% maka menerima H0, yang artinya berpengaruh signifikan positif. Maka PDRB DKI Jakarta tahun 2000 – 2016 berpengaruh secara signifikan sesuai hipotesis terhadap penerimaan pajak daerah DKI Jakarta.

2) Uji t-statistik koefisien variabel X_2 (jumlah tenaga kerja asing)

   $H_0 : \beta_2 \leq \alpha$

   $Ha : \beta_2 > \alpha$

   Variabel X_2 (jumlah tenaga kerja asing) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0011 lebih kecil dari alfa 10% maka menerima H0, yang artinya berpengaruh signifikan secara negatif karena nilai koefisien dari X_2 sebesar -1501127. Maka jumlah tenaga kerja asing DKI Jakarta tahun 2000 – 2016 berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah DKI Jakarta.

3) Uji t-statistik koefisien variabel X_3 (jumlah penerbitan STNK balik nama)

   $H_0 : \beta_3 \leq \alpha$

   $Ha : \beta_3 > \alpha$

   Variabel X_3 (jumlah penerbitan STNK balik nama) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.5452 lebih besar dari alfa 10% maka menolak H0, yang artinya tidak berpengaruh signifikan. Maka jumlah penerbitan STNK balik nama DKI Jakarta tahun 2000 – 2016 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah DKI Jakarta.

4) Uji t-statistik koefisien variabel X_4 (tingkat inflasi)

$H_0 : \beta_4 \leq \alpha$

$Ha : \beta_4 > \alpha$

Variabel X_4 (tingkat inflasi) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0622 lebih kecil dari alfa 10% maka menerima H0, yang artinya berpengaruh signifikan positif. Maka tingkat inflasi DKI Jakarta tahun 2000 – 2016 berpengaruh secara signifikan positif terhadap penerimaan pajak daerah DKI Jakarta.

Koefisien Determinasi (R2)

Uji R2 digunakan untuk mengetahui berapa persen variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independent. Nilai R2 hasil estimasi menunjukkan nilai sebesar 0.98, yang berarti bahwa 98% variasi variabel dependen Pajak Daerah dapat dijelaskan oleh variasi variabel independent PDRB, jumlah tenaga kerja asing, jumlah penerbitan STNK balik nama, dan tingkat inflasi, sedangkan sisanya yaitu 2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak daerah mempunyai hubungan yang positif dan signifikan. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin besar PDRB berarti pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin tinggi. Bila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat pula. Dengan naiknya pendapatan masyarakat, maka tingkat konsumsi masyarakat akan meningkat pula, dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Pengaruh jumlah tenaga kerja asing terhadap penerimaan pajak daerah mempunyai pengaruh signifikan negatif. Hal ini karena bertambahnya jumlah tenaga kerja asing di DKI Jakarta maka akan mengurangi jumlah tenaga kerja lokal. Diketahui tenaga kerja asing yang berada di Jakarta rata-rata sebagai tenaga kerja ahli dan sebagai penanam modal. Masa domisilinya pun hanya sebentar kemudian pulang ke negara asal, sehingga penghasilan yang diperoleh digunakan untuk konsumsi di negara asal. Sedangkan jumlah tenaga kerja lokal yang

berkurang maka akan mengurangi tingkat konsumsi terhadap barang dan jasa daerah, sehingga mengakibatkan penerimaan pajak daerah menurun.

Pengaruh jumlah penerbitan STNK balik nama kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah mempunyai pengaruh yang tidak signifikan. Hal tersebut terjadi karena pajak bea balik nama STNK terhadap kendaraan bermotor berbeda-beda tergantung tahun keluaran kendaraan dan harga jualnya, semakin tua tahun keluaran dan harga jual semakin murah maka pajak bea balik nama kendaraan bermotor tersebut juga ikut murah. Sehingga pajak bea balik nama STNK belum efektif dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah, ditambah masih banyak pemilik STNK balik nama belum membayar pajak atau belum menebus STNK balik nama dari SAMSAT.

Pengaruh tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah mempunyai hubungan signifikan positif. Hal tersebut terjadi karena tingkat inflasi yang rata-rata dibawah 10% atau pada persentase inflasi ringan, maka akan memberikan gairah terhadap perekonomian, memberikan semangat terhadap orang untuk bekerja, meningkatkan pendapatan, mendorong untuk menabung dan berinvestasi dan meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa yang pada selanjutnya maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1) Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini berarti semakin besar PDRB maka semakin besar penerimaan pajak Daerah.Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin besar PDRB berarti pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin tinggi. Bila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat pula. Dengan naiknya pendapatan masyarakat, maka tingkat konsumsi masyarakat akan meningkat pula, dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak.

2) Jumlah tenaga kerja asing berpengaruh signifikan negatif terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini karena bertambahnya jumlah tenaga kerja asing di DKI Jakarta maka akan mengurangi jumlah tenaga kerja lokal. Diketahui tenaga kerja asing yang berada di Jakarta rata-rata sebagai tenaga kerja ahli dan sebagai penanam modal. Masa domisilinya pun hanya sebentar kemudian pulang ke negara asal, sehingga penghasilan yang diperoleh digunakan untuk konsumsi di negara asal. Sedangkan jumlah tenaga kerja lokal yang berkurang maka akan mengurangi tingkat konsumsi terhadap barang dan jasa daerah, sehingga mengakibatkan penerimaan pajak daerah menurun.
3) Jumlah penerbitan STNK balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini terjadi karena pajak bea balik nama STNK terhadap kendaraan bermotor berbeda-beda tergantung tahun keluaran kendaraan dan harga jualnya, semakin tua tahun keluaran dan harga jual semakin murah maka pajak bea balik nama kendaraan bermotor tersebut juga ikut murah. Sehingga pajak bea balik nama STNK belum efektif dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah.
4) Inflasi berpengaruh secara signifikan positif terhadap penerimaan pajak daerah. Hal tersebut terjadi karena tingkat inflasi yang rata-rata dibawah 10% atau pada persentase inflasi ringan, maka akan memberikan gairah terhadap perekonomian, memberikan semangat terhadap orang untuk bekerja, meningkatkan pendapatan, mendorong untuk menabung dan berinvestasi dan meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa yang pada selanjutnya maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Implikasi

1) PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah DKI Jakarta. oleh karena itu pemerintah harus dapat mengoptimalkan berbagai sektor yang ada untuk terus mendorong kenaikan PDRB terhadap penerimaan pajak daerah.

2) Jumlah tenaga kerja asing berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu pemerintah harus membatasi kuota tenaga ahli dari pekerja asing dan mengawasi jangan sampai ada praktik tenaga kerja asing ilegal yang dipekerjakan di DKI Jakarta karena hal tersebut dapat merugikan pemerintah daerah.
3) Jumlah penerbitan STNK balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap penerimaan daerah. Oleh karena itu pemerintah harus lebih memperhatikan pengelolaan pajak daerah yang bisa diterima dari jumlah penerbitan STNK balik nama, agar dapat mendorong jumlah penerimaan pajak daerah.
4) Inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Pemerintah harus terus memperhatikan kondisi pasar agar inflasi memberikan dampak yang positif, dimana dapat mendorong masyarakat untuk gairah bekerja, menabung dan mengadakan investasi yang nantinya meningkatkan pendapatan perkapita dan konsumsi masyarakat, sehingga yang pada akhirnya akan menambah kontribusi penerimaan pajak daerah.

Daftar Pustaka

Arianto, 2014. *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak di Kota Surabaya*. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 1.* Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.

Gujarati Damodar, 1995. *Ekonometrika Dasar. Alih Bahasa Sumarno Zein*. Erlangga. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2017. *Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka*. Jakarta. BPS.

Haniz f., 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal. Skripsi.* Universitas Diponegoro.

Mangkoesoebroto, Guritno, 1998. "*Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia Subtansi dan Urgensi"*. PT. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.6 Tahun 2010. *Tentang Pajak Daerah.*

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta no. 9 tahun 2010. Tentang Pajak Bea Balik Nama STNK

Thamrin Simanjuntak. 2001, *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.

Undang-Undang Republik Indonesia No.34 Tahun 2000. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Pendapatan.

Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah.